WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Langsa menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694;
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
4. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

Pasal 2 ..

Pasal 2

Peraturan ini menetapkan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Langsa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rincian Dana Gampong untuk setiap gampong di Kota Langsa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis gampong setiap Kota.

Pasal 4

Alokasi dasar per gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0{,}25 \times Y1) + (0{,}35 \times Y2) + (0{,}10 \times Y3) + (0{,}30 \times Y4)] \times (0.10 \times DD)$$

Keterangan:

X = Dana Gampong setiap Gampong yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis gampong setiap Kota
Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk gampong dalam Kota Langsa
Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin gampong
Y3 = rasio luas wilayah Gampong setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong dalam Kota Langsa
Y4 = rasio IKG Kota terhadap total IKG Kota yang memiliki Gampong
DD= pagu Dana Desa (Dana Gampong) Nasional

Pasal 7 ...

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(3) Penyaluran Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
    a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
    b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
    c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
(4) Penyaluran Dana Gampong Tahap I dilakukan setelah Geuchik menyampaikan:
    a. qanun Gampong mengenai APBGampong kepada Walikota.
    b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.
    c. geuchik menyampaikan qanun gampong dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret.
(5) Penyaluran Dana Gampong Tahap II dilakukan setelah Geuchik menyampaikan:
    a. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I kepada Walikota.
    b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Gampong tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
    c. geuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.
(6) Penyaluran Dana Gampong Tahap III dilakukan setelah Geuchik menyampaikan:
    a. Penyaluran Dana Gampong tahap III dilakukan setelah geuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I dan tahap II kepada Walikota.
    b. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Gampong tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

c. geuchik ...

c. geuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan September.

(7) Rincian Dana Gampong yang diterima gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBGampong.

Pasal 9

Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
b. Pembangunan sarana dan prasarana Gampong;
c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;dan
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBGampong harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3) Pengeluaran kas Gampong yang mengakibatkan beban APBGampong tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
(4) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Geuchik dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Gampong Tahunan kepada Walikota.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
   b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
   c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Gampong Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal ...

Pasal 13

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Gampong dalam hal Geuchik tidak menyampaikan APBGampong dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBGampong dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
(3) Walikota mengurangi penyaluran dana Gampong dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
(4) SiLPA Dana Gampong yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Gampong yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Gampong yang diterima Gampong.
(5) Penggunaan Dana Gampong yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota.
(6) Pengurangan Dana Gampong dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Desember 2015 M
17 Rabiul Akhir 1437 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 29 Desember 2015 M
17 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 565

LAMPIRAN:
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH PAGU
		40%	40%	20%	100%
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN LANGSA TIMUR				
	1 BUKET MEDANG ARA	Rp 244,037,600	Rp 244,037,600	Rp 122,018,800	Rp 610,094,000
	2 MATANG SEUTUI	Rp 241,648,400	Rp 241,648,400	Rp 120,824,200	Rp 604,121,000
	3 BUKET PULO	Rp 239,601,600	Rp 239,601,600	Rp 119,800,800	Rp 599,004,000
	4 MATANG PANYANG	Rp 247,788,000	Rp 247,788,000	Rp 123,894,000	Rp 619,470,000
	5 SIMPANG WIE	Rp 241,921,200	Rp 241,921,200	Rp 120,960,600	Rp 604,803,000
	6 BUKET RATA	Rp 247,476,000	Rp 247,476,000	Rp 123,738,000	Rp 618,690,000
	7 BUKET MEUTUAH	Rp 249,293,200	Rp 249,293,200	Rp 124,646,600	Rp 623,233,000
	8 ALUE MERBAU	Rp 253,622,400	Rp 253,622,400	Rp 126,811,200	Rp 634,056,000
	9 MATANG CENGAI	Rp 251,119,200	Rp 251,119,200	Rp 125,559,600	Rp 627,798,000
	10 SEUNEBOK ANTARA	Rp 245,420,400	Rp 245,420,400	Rp 122,710,200	Rp 613,551,000
	11 ALUE PINEUNG	Rp 250,098,400	Rp 250,098,400	Rp 125,049,200	Rp 625,246,000
	12 SUKAREJO	Rp 251,418,400	Rp 251,418,400	Rp 125,709,200	Rp 628,546,000
	13 CINTA RAJA	Rp 258,612,400	Rp 258,612,400	Rp 129,306,200	Rp 646,531,000
	14 SUNGAI LUENG	Rp 253,234,800	Rp 253,234,800	Rp 126,617,400	Rp 633,087,000
	15 ALUE PINEUNG TIMUE	Rp 245,739,200	Rp 245,739,200	Rp 122,869,600	Rp 614,348,000
	16 KAPA	Rp 239,536,800	Rp 239,536,800	Rp 119,768,400	Rp 598,842,000
II	KECAMATAN LANGSA BARAT				
	1 LHOK BANIE	Rp 280,251,200	Rp 280,251,200	Rp 140,125,600	Rp 700,628,000
	2 PAYA BUJOK TEUNGOH	Rp 249,045,600	Rp 249,045,600	Rp 124,522,800	Rp 622,614,000
	3 PAYA BUJOK BEURAMO	Rp 250,791,600	Rp 250,791,600	Rp 125,395,800	Rp 626,979,000
	4 SIMPANG LHEE	Rp 249,142,800	Rp 249,142,800	Rp 124,571,400	Rp 622,857,000
	5 SEURIGET	Rp 252,368,400	Rp 252,368,400	Rp 126,184,200	Rp 630,921,000
	6 MATANG SEULIMENG	Rp 294,657,600	Rp 294,657,600	Rp 147,328,800	Rp 736,644,000
	7 SUNGAI PAUH	Rp 267,426,000	Rp 267,426,000	Rp 133,713,000	Rp 668,565,000
	8 KUALA LANGSA	Rp 274,585,200	Rp 274,585,200	Rp 137,292,600	Rp 686,463,000
	9 TELAGA TUJUH	Rp 281,094,400	Rp 281,094,400	Rp 140,547,200	Rp 702,736,000
	10 SERAMBI INDAH	Rp 240,538,400	Rp 240,538,400	Rp 120,269,200	Rp 601,346,000
	11 SUNGAI PAUH PUSAKA	Rp 261,963,600	Rp 261,963,600	Rp 130,981,800	Rp 654,909,000
	12 SUNGAI PAUH TANJONG	Rp 262,596,000	Rp 262,596,000	Rp 131,298,000	Rp 656,490,000
	13 SUNGAI PAUH FIRDAUS	Rp 246,261,200	Rp 246,261,200	Rp 123,130,600	Rp 615,653,000

III. KECAMATAN..

1	2		3	4	5	6
III	KECAMATAN LANGSA KOTA					
	1	TEUNGOH	Rp 288,905,200	Rp 288,905,200	Rp 144,452,600	Rp 722,263,000
	2	PEUKAN LANGSA	Rp 239,210,400	Rp 239,210,400	Rp 119,605,200	Rp 598,026,000
	3	JAWA	Rp 296,664,400	Rp 296,664,400	Rp 148,332,200	Rp 741,661,000
	4	PAYA BUJOK BLANG PASE	Rp 269,597,600	Rp 269,597,600	Rp 134,798,800	Rp 673,994,000
	5	BLANG	Rp 249,398,000	Rp 249,398,000	Rp 124,699,000	Rp 623,495,000
	6	ALUE BEURAWE	Rp 263,207,200	Rp 263,207,200	Rp 131,603,600	Rp 658,018,000
	7	DAULAT	Rp 240,876,800	Rp 240,876,800	Rp 120,438,400	Rp 602,192,000
	8	MEUTIA	Rp 253,759,600	Rp 253,759,600	Rp 126,879,800	Rp 634,399,000
	9	BLANG SEUNIBONG	Rp 256,869,600	Rp 256,869,600	Rp 128,434,800	Rp 642,174,000
	10	TUALANG TEUNGOH	Rp 259,228,000	Rp 259,228,000	Rp 129,614,000	Rp 648,070,000
IV	KECAMATAN LANGSA LAMA					
	1	PONDOK KEMUNING	Rp 269,597,600	Rp 269,597,600	Rp 134,798,800	Rp 673,994,000
	2	SEULALAH	Rp 255,085,200	Rp 255,085,200	Rp 127,542,600	Rp 637,713,000
	3	PONDOK PABRIK	Rp 250,650,400	Rp 250,650,400	Rp 125,325,200	Rp 626,626,000
	4	SIDODADI	Rp 255,212,000	Rp 255,212,000	Rp 127,606,000	Rp 638,030,000
	5	SIDOREJO	Rp 267,445,200	Rp 267,445,200	Rp 133,722,600	Rp 668,613,000
	6	BARO	Rp 248,864,000	Rp 248,864,000	Rp 124,432,000	Rp 622,160,000
	7	MEURANDEH	Rp 244,180,400	Rp 244,180,400	Rp 122,090,200	Rp 610,451,000
	8	ASAM PEUTIK	Rp 251,804,800	Rp 251,804,800	Rp 125,902,400	Rp 629,512,000
	9	BAROH LANGSA LAMA	Rp 269,248,000	Rp 269,248,000	Rp 134,624,000	Rp 673,120,000
	10	SEULALAH BARU	Rp 251,599,600	Rp 251,599,600	Rp 125,799,800	Rp 628,999,000
	11	SUKA JADI KEBUN IRENG	Rp 252,565,200	Rp 252,565,200	Rp 126,282,600	Rp 631,413,000
	12	MEURANDEH TEUNGOH	Rp 245,954,400	Rp 245,954,400	Rp 122,977,200	Rp 614,886,000
	13	MEURANDEH DAYAH	Rp 245,080,400	Rp 245,080,400	Rp 122,540,200	Rp 612,701,000
	14	MEURANDEH ACEH	Rp 245,543,200	Rp 245,543,200	Rp 122,771,600	Rp 613,858,000
	15	BATE PUTEH	Rp 247,276,800	Rp 247,276,800	Rp 123,638,400	Rp 618,192,000
IV	KECAMATAN LANGSA BARO					
	1	TIMBANG LANGSA	Rp 259,684,400	Rp 259,684,400	Rp 129,842,200	Rp 649,211,000
	2	ALUE DUA	Rp 254,402,800	Rp 254,402,800	Rp 127,201,400	Rp 636,007,000
	3	BIREM PUNTONG	Rp 261,194,000	Rp 261,194,000	Rp 130,597,000	Rp 652,985,000
	4	PAYA BUJOK SEULEUMAK	Rp 318,701,200	Rp 318,701,200	Rp 159,350,600	Rp 796,753,000
	5	PONDOK KELAPA	Rp 254,715,600	Rp 254,715,600	Rp 127,357,800	Rp 636,789,000
	6	KARANG ANYAR	Rp 259,412,400	Rp 259,412,400	Rp 129,706,200	Rp 648,531,000
	7	PAYA BUJOK TUNONG	Rp 276,174,400	Rp 276,174,400	Rp 138,087,200	Rp 690,436,000
	8	GEUDUBANG JAWA	Rp 260,321,600	Rp 260,321,600	Rp 130,160,800	Rp 650,804,000
	9	GEUDUBANG ACEH	Rp 254,454,000	Rp 254,454,000	Rp 127,227,000	Rp 636,135,000
	10	ALUE DUA BAKARAN BATEE	Rp 259,780,800	Rp 259,780,800	Rp 129,890,400	Rp 649,452,000
	11	LENGKONG	Rp 260,711,600	Rp 260,711,600	Rp 130,355,800	Rp 651,779,000
	12	SUKA JADI MAKMUR	Rp 249,678,000	Rp 249,678,000	Rp 124,839,000	Rp 624,195,000
		JUMLAH	Rp 16,958,344,800	Rp 16,958,344,800	Rp 8,479,172,400	Rp 42,395,862,000

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH